BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk sebagai alat atau instrument pembangunan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Penduduk atau Kependudukan menjadi acuan utama untuk menentukan perencanaan dan sasaran pembangunan. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaannya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan itu tentunya dibutuhkan perencanaan dan realisasi yang sejalan.

Mengenai pentingnya penduduk atau kependudukan menjadi alat atau instrument dalam penentuan kebijakan dengan cukup jelas ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dijelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam Pasal 58 ayat (4) menyatakan bahwa Data Kependudukan yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal adalah data kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, sehingga melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka data dan informasi yang digunakan adalah data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang dikemas secara baik, sederhana dan informative, dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi Kependudukan Kota Parepare serta prediksi prospek kependudukan di masa mendatang.

B. Tujuan

Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2018 ini disusun dengan memanfaatkan data registrasi yang dihasilkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sumber data lainnya, yang bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Kota Parepare.
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan.
3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Kota Parepare dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan, dan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan pihak lain yang memerlukan.

C. Ruang Lingkup

Profil perkembangan kependudukan Kota Parepare ini mencakup gambaran umum wilayah Kota Parepare, yang terdiri dari letak geografis daerah, kondisi demografis, gambaran ekonomi dan potensi daerah. Selanjutnya didalam profil perkembangan kependudukan ini juga memaparkan beberapa sumber data yang berasal dari registrasi, non registrasi dan data dari lintas sektor. Sehingga dengan sumber data tersebut dapat digambarkan perkembangan kependudukan Kota Parepare dari segi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Pengertian Umum Istilah yang Digunakan

1. ***Penduduk*** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. ***Kependudukan*** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan penduduk, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan ekonomi setempat.
3. ***Perkembangan kependudukan*** adalah kondisai yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4. ***Data Kependudukan*** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. ***Profil Perkembangan Kependudukan*** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
6. ***Administrasi Kependudukan*** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. ***Kuantitas Penduduk*** adalah jumlah penduduk sebagai akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
8. ***Kualitas Penduduk*** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang berbudaya, berprikebadian dan layak.
9. ***Mobilitas Penduduk*** adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain baik dalam daerah maupun antar daerah (melewati batas Administrasi suatu wilayah).

10. ***Persebaran Penduduk*** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
11. ***Kematian atau mortalitas menurut WHO*** adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
12. ***Mobilitas penduduk permanen (migrasi)*** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi international);
13. ***Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)*** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ketempat lain melewati batas administrative. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (commuting) dan menginap/mondok ;
14. ***Penduduk musiman*** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanenn yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang.
15. ***Mobilitas penduduk ulang alik (commuting)*** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
16. ***Migrasi kembali (return migration)*** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda.
17. ***Migrasi semasa hidup (life time migration)*** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya.
18. ***Migrasi Risen (recent migration)*** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
19. ***Penduduk Usia Kerja*** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

20. ***Penduduk angkatan kerja*** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
21. ***Penduduk bukan angkatan kerja*** adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
22. ***Bekerja*** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus menerus dalam seminggu. Kegitan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
23. ***Angka partisipasi angkatan kerja*** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
24. ***Mencari pekerjaan atau pengangguran terbuka*** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
25. ***Sekolah*** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi.
26. ***Mengurus rumah tangga*** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya menggurus rumah tangga dianggap bekerja.
27. ***Pendidikan tertinggi yang ditamatkan*** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat belajar (Ijazah).
28. ***Status pekerjaan*** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

29. ***Angka pengangguran*** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.

30. ***Bukan angkatan kerja*** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas.

31. ***Lahir hidup*** adalah Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.

33. ***Lahir mati*** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan:

34. ***Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)*** adalah rata-rata banyaknya anak yang dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya.

35. ***Angka kematian bayi baru lahir*** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

36. ***Angka kematian kasar*** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;

37. ***Penduduk Melek Huruf*** adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka , buta bahassa indonesia, dan buta pengalaman dasar;

38. ***Proporsi penduduk*** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;

39. ***Rasio jenis kelamin*** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;

40. ***Piramida penduduk*** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;

41. ***Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depedency ratio)*** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk dibawah usia 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
42. ***Rasio kepadatan penduduk*** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
43. ***Angka perkawinan kasar*** adalah angka yang menunjukkan presentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu
44. ***Angka perkawinan umum*** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
45. ***Angka perceraian kasar*** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu ;
46. ***Angka perceraian umum*** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu;

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH.

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Parepare merupakan daerah transit yang cukup strategis, karena berada di tengah-tengah wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang menjadi penghubung antara wilayah Selatan dan Utara di Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kota Parepare terletak antara 3° 57”39” - 4° 04’ 49” Lintang Selatan dan 119° 36’ 24’’ - 119° 43” 40” Bujur Timur, dimana sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai.

PETA ADMINISTRATIF KOTA PAREPARE

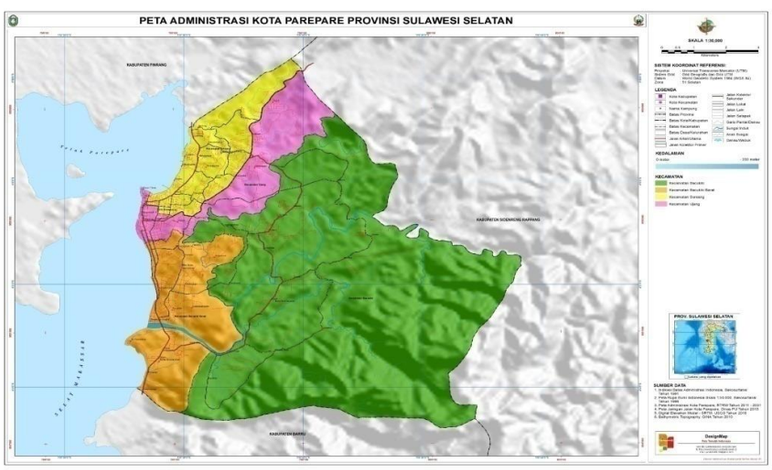

Kota Parepare mempunyai luas wilayah sebesar ± 99,33 Km2 atau 0,21 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas empat Kecamatan yakni, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki Barat. Kecamatan Bacukiki merupakan Kecamatan yang terbesar dengan luas wilayah sebesar 66,67 Km2 persegi atau 67,12 % dari luas wilayah Kota Parepare yang terbagi dalam empat kelurahan yakni Kelurahan Wattang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, dan Kelurahan Galung Maloang.

Kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah 8,31 Km2 atau 8,37 % dari luas wilayah Kota Parepare. Kecamatan ini terdiri atas 6 kelurahan yakni Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Wattang Soreang dan Kelurahan Bukit Harapan.

Wilayah terbesar kedua setelah Bacukiki adalah kecamatan Bacukiki Barat dengan luas wilayah 13,05 Km2 yang didalamnya terdiri dari Kelurahan Lumpue, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Kampung Baru, menyusul Kecamtan Ujung di urutan ketiga denga luas wilayah 11,30 Km2, yang meliputi Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Ujung Bulu, dan Kelurahan Lapadde.

Secara keseluruhan, Kota Parepare terdiri dari 22 kelurahan dengan perincian 4 Kelurahan di Kecamatan Bacukiki, 5 Kelurahan di Kecamatan Ujung, 7 Kelurahan di Kecamatan Soreang, dan 6 Kelurahan di kecamatan bacukiki Barat. Adapun Jumlah RT/RW sebanyak 570 yang terdiri dari 89 RT/RW di Kecamatan Bacukiki, 150 RT/RW di Kecamatan Ujung, 200 RT/RW di Kecamatan Soreang dan 132 RT/RW di Kecamatan Bacukiki Barat.

Ditinjau dari aspek topografi wilayah, lebih dari 85 % wilayah Kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 Ha, berbukit-bukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.215,04 Ha, sehingga untuk pengembangan fisik kota akan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi ini. Formasi perbukitan ini pada bagian selatan kota mendekat ke arah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada di pusat kota yaitu sekitar 1,2 km. Dengan kondisi topografi seperti ini, maka wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat dengan luas keseluruhan ± 1.097,04 Ha, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk dan kegiatan perkotaan lainnya. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kota Parepare dengan wilayah yang bergelombang sampai bergunung, maka 87% dari luas wilayahnya terletak pada ketinggian diatas 25 meter dpl, bahkan sampai mencapai ketinggian 500 meter dpl. Daerah dengan ketinggian 0 – 25 meter dpl, berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk.

Struktur geologi yang terdapat di Kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah Kota Parepare antara lain: endapan alluvial dan pantai, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral, selain itu terdapat juga batu gunung api di Kota Parepare seperti tufu, breksi, konglomerat dan lava. Jenis tanah yang terdapat antara lain: tanah regosol yaitu tanah yang memiliki tekstur kasar dengan kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal serta tanah alluvial yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan.

Kota Parepare beriklim tropis yang dipengaruhi oleh tekanan udara pada garis Khatulistiwa dan angin dari arah Barat dan Selatan dengan kecepatan rata-rata 2,4 m/detik. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada akhir tahun, yaitu pada bulan November dan Desember serta Januari hingga Februari, jumlah hari hujan pada musim hujan tersebut juga berbeda beda. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Maret sampai dengan September. Ukuran waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota negara Jakarta dan 8 jam

lebih cepat dari Greenwich Meridian Time (GMT). Berdasarkan catatan stasiun Klimatologi, suhu udara rata-rata Kota Parepare adalah 28,5°C dengan suhu minimum sebesar 25,6°C dan suhu maksimum sebesar 31,5°C.

B. **KONDISI DEMOGRAFIS KOTA PAREPARE**

Belum meratanya persebaran dan distribusi penduduk masih menjadi masalah semua kabupaten dan kota di Indonesia termasuk Kota Parepare, di satu sisi ada wilayah yang kepadatan penduduknya cukup tinggi tetapi di sisi lain ada wilayah yang kepadatan penduduknya relatif rendah.

Kota Parepare merupakan satu dari tiga Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan luas wilayahnya sebesar 99,33 Km persegi, dan pada tanggal 31 Desember 2015 Kota Parepare didiami penduduk sebanyak 175.468 Jiwa yang terdiri dari 87.990 jiwa laki-laki dan 87.478 jiwa perempuan. Dilihat dari persebaran penduduknya sepanjang Tahun 2015 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk tinggal di Kecamatan Soreang yakni 32,84 % , Kecamatan Bacukiki Barat 32.62 % dan Kecamatan Ujung 24,17 % , sedangkan presentase persebaran penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Bacukiki dengan 10.37 %.

Kecamatan Bacukiki dengan luas wilayah 66,67 Km2 mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah yakni 273 jiwa/Km2, sedangkan Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Soreang dengan tingkat kepadatan penduduk 6934 jiwa/Km2.

C. GAMBARAN EKONOMI KOTA PAREPARE

Kota Parepare dikenal dengan letaknya yang cukup strategis, terletak tepat ditengah dan menjadi penghubung antara wilayah Utara dan Wilayah Selatan Propinsi Sulawesi Selatan, selain itu terdapat dua pelabuhan yang jadi penghubung dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, sehingga lalu lintas perdagangan dan penumpang cukup tinggi di Kota Parepare.

BAB III

SUMBER DATA

1. Data Registrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) operasional status 31 Desember 2015, maupun laporan secara manual.
2. Data hasil Konsolidasi Pusat Data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Situs resmi Pemerintah Kota Parepare, www.pareparekota.go.id

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. KUANTITAS PENDUDUK

a. Jumlah dan Persebaran penduduk.

Belum meratanya persebaran dan distribusi penduduk masih menjadi masalah semua kabupaten dan kota di Indonesia termasuk Kota Parepare, di satu sisi ada wilayah yang kepadatan penduduknya cukup tinggi tetapi di sisi lain ada wilayah yang kepadatan penduduknya relatif rendah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor terutama dari segi geografis wilayah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Parepare itu sendiri.

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/kelurahan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut jenis Kelamin perkecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI_LAKI	%	PEREMPUAN	%	JML_PDDK	%
1	BACUKIKI	9551	6.76	9668	6.84	19219	13.6
2	UJUNG	16120	11.4	16562	11.7	32682	23.1
3	SOREANG	22808	16.1	23186	16.4	45994	32.6
4	BACUKIKI BARAT	21386	15.1	22028	15.6	43414	30.7
	KOTA PAREPARE	69865	49.4	71444	50.6	141309	100

Dari tabel 1 diatas nampak bahwa Kota Parepare didiami penduduk sebanyak 141.309 Jiwa yang terdiri dari 69.865 jiwa laki-laki dan 71.444 jiwa perempuan. Dilihat dari persebaran penduduknya sepanjang Tahun 2017 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk tinggal di Kecamatan Soreang yakni 32,6 % , Kecamatan Bacukiki Barat 30.7 % dan Kecamatan Ujung 23,1 % , sedangkan presentase

persebaran penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Bacukiki dengan 13,6 %. Dan berdasarkan pada tabel 2 dibawah terlihat bahwa Keluarahan Lapadde kecamatan Ujung masih mendominasi jumlah penduduk terbanyak di Kota Parepare yakni berjumlah 14.272 Jiwa atau 10.1 % dari total penduduk Kota Parepare. Sedangkan Jumlah penduduk terkecil berada di Kelurahan Mallusetasi yang hanya berjumlah 1.881 Jiwa atau 1,33 % dari total jumlah penduduk Kota Parepare.

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut jenis Kelamin perkelurahan

KODE	KELURAHAN	LK	%	PR	%	JUM	%
11004	LOMPOE	4833	3.42	4806	3.4	9639	6.82
11005	WT. BACUKIKI	1021	0.72	1071	0.76	2092	1.48
11009	LEMOE	1344	0.95	1394	0.99	2738	1.94
11010	GALUNG MALOANG	2353	1.67	2397	1.7	4750	3.36
1	**KEC. BACUKIKI**	**9551**	**6.76**	**9668**	**6.84**	**19219**	**13.6**
21001	LABUKKANG	3509	2.48	3556	2.52	7065	5
21002	UJUNG SABBANG	1690	1.2	1765	1.25	3455	2.44
21003	UJUNG BULU	2949	2.09	3060	2.17	6009	4.25
21004	LAPADDE	7028	4.97	7244	5.13	14272	10.1
21005	MALLUSETASI	944	0.67	937	0.66	1881	1.33
2	**KEC. UJUNG**	**16120**	**11.4**	**16562**	**11.7**	**32682**	**23.1**
31001	LAKESSI	1511	1.07	1656	1.17	3167	2.24
31002	UJUNG BARU	2576	1.82	2748	1.94	5324	3.77
31003	WATANG SOREANG	3520	2.49	3450	2.44	6970	4.93
31004	KAMPUNG PISANG	1650	1.17	1767	1.25	3417	2.42
31005	UJUNG LARE	2116	1.5	2132	1.51	4248	3.01
31006	BUKIT INDAH	5909	4.18	6000	4.25	11909	8.43

31007	BUKIT HARAPAN	5526	3.91	5433	3.84	10959	7.76
3	**KEC. SOREANG**	**22808**	**16.1**	**23186**	**16.4**	**45994**	**32.6**
41001	KAMPUNG BARU	2555	1.81	2686	1.9	5241	3.71
41002	CAPPAGALUNG	3455	2.44	3636	2.57	7091	5.02
41003	LUMPUE	4456	3.15	4609	3.26	9065	6.42
41004	TIRO SOMPE	3462	2.45	3558	2.52	7020	4.97
41005	SUMPANG MINANGAE	2693	1.91	2751	1.95	5444	3.85
41006	BUMI HARAPAN	4765	3.37	4788	3.39	9553	6.76
4	**KEC. BACUKIKI BARAT**	**21386**	**15.1**	**22028**	**15.6**	**43414**	**30.7**
	KOTA PAREPARE	**69865**	**49.4**	**71444**	**50.6**	**141309**	**100**

2. Kepadatan Penduduk

Kota Parepare merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat. Tabel 3 memperlihatkan kepadatan Penduduk di Kota Parepare dengan luas 99.33 Km persegi. Kota Parepare didiami oleh 175.468 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 1767 jiwa/ Km persegi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk, luas wilayah dan tingkat kepadatan

.NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WIL	KEPADATAN /KM 2
1	BACUKIKI	19219	66.67	288
2	UJUNG	32682	11.3	2892
3	SOREANG	45994	8.31	5535
4	BACUKIKI BARAT	43414	13.5	3216
	KOTA PAREPARE	141309	99.33	1423

Dari tabel 3. Diatas menunjukkan bahwa persebaran dan distribusi penduduk di Kota parepare memiliki masalah yang sama dengan hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari

jumlah kepadatan yang ada di Kecamatan Bacukiki. Sangat berbeda jauh dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Parepare. Hal ini dikarenakan oleh kondisi geografis kecamatan Bacukiki yang didominasi oleh wilayah pegunungan. Di samping itu kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Parepare lebih cenderung berada pada daerah pesisir seperti kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat. Sehingga faktor itulah yang menyebabkan warga Kota Parepare lebih memilih untuk bermukim di dua kecamatan tersebut

b.Penduduk menurut karakter demografi.

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

a). Rasio jenis kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.dalam rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.selain itu,informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi,terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI_LAKI	PEREMPUAN	RASIO
1	BACUKIKI	9551	9668	99
2	UJUNG	16120	16562	97
3	SOREANG	22808	23186	98
4	BACUKIKI BARAT	21386	22028	97
	KOTA PAREPARE	69865	71444	98

Dari tabel 5. Terlihat bahwa Rasio jenis Kelamin (RKJ) atau *Sex Ratio* penduduk Kota Parepare adalah **98** Yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Bacukiki dan Bacukiki Barat jumlah laki-laki sudah sedikit lebih banyak di banding perempuan. Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio di dua kecamatan tersebut hanya berkisar 99 dan 97. Hal ini berarti bahwa disetiap 100 penduduk laki-laki di dua kecamatan tersebut terdapat berkisar 97 sampai 99 penduduk perempuan.

b). Piramida Penduduk

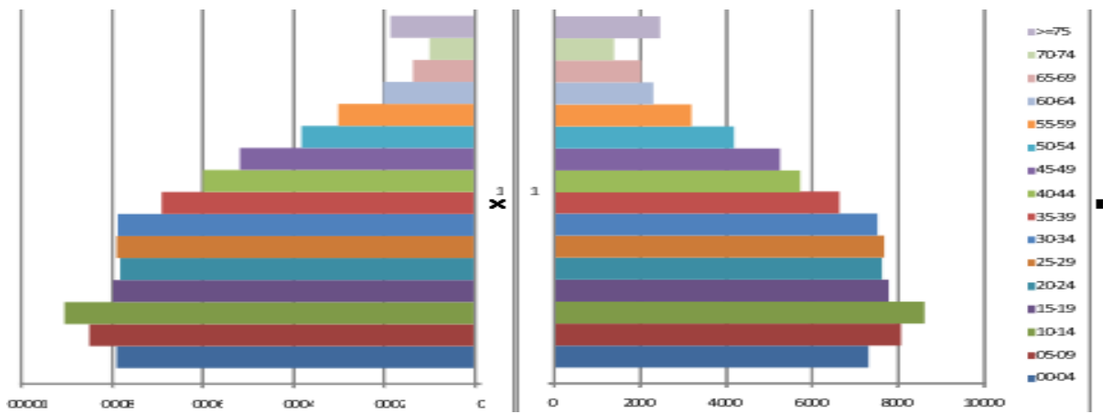

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk,dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan

Piramida penduduk Kota Parepare menunjukkan struktur penduduk constrictive dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur diatasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada piramida tersebut tergambar, penduduk usia 10 sampai dengan 14 tahun dengan jumlah penduduk paling besar menyusul penduduk usia 20 sampai dengan 34 tahun. Tingginya penduduk usia 10 sampai dengan 14 tahun menunjukkan dalam lima tahun kedepan, kelompok ini bakal memasuki usia produktif dan menjadi tenaga kerja baru. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah harus menyiapkan penduduk yang layak, ketersediaan kebutuhan sandang, pangan dan papan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kedepannya kelompok usia ini mamapu bersaing untuk memasuki pasar kerja baik yang disediakan oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Pendududk lansia (65 tahun keatas), menunjukkan proporsi yang cukup kecil yaitu 5,4 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Poertambahan jumlah lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar dimasa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainya

Bila dikaitkan dengan median umur penduduk, maka penduduk Kota Parepare termasuk dalam kategori penduduk *intermediate*.

c). Rasio ketergantungan.

Rasio Ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan di gunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 Tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 Tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif

atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif

Tabel 6. Usia Non produktif dan Usia Produktif.

NO.	UMUR	LK	PR	JML	%
1	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	21002	19692	40694	28.8
2	15-64 Tahun (Usia Produktif)	45993	47874	93867	66.4
3	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	2870	3878	6748	4.78
4	JUMLAH	69865	71444	141309	100

Tabel 6 diatas menunjukkan presentase usia produktif dan non produktif. Usia non produktif penduduk Kota Parepare berjumlah 47.442 atau 33.58 persen. Selebihnya adalah penduduk yang berusia produktif berjumlah 93.867 jiwa atau 66.4 persen. Ini menunjukkan bahwa Kota Parepare termasuk kategori Kota yang produktif apabila ditinjau dari segi umur.

Tabel 7. Rasio Usia Produktif Dan Non Produktif

NO	KECAMATAN	<14 TAHUN	>65 TAHUN	JUMLAH	USIA PRODUKTIF	RASIO
1	BACUKIKI	5741	779	6520	12699	195
2	UJUNG	9000	1627	10627	22055	208
3	SOREANG	13255	2249	15504	30490	197
4	BACUKIKI BARAT	12698	2093	14791	28623	194
7372	KOTA PAREPARE	40694	6748	47442	93867	198

Dari tabel 7 terlihat bahwa rasio ketergantungan kota Parepare sebesar 198. Berdasarkan tabel diatas, rasio ketergantungan tertinggi terdapat di kecamatan Ujung dengan rasio 208 Menyusul kecamatan Soreang dengan rasio 197, Kecamatan Bacukiki dengan 185 dan Kecamatan Bacukiki Barat dengan 194

2. Jumlah dan Proporsi penduduk menurut status kawin.

Dalam hal ini konsep perkawinan difokuskan pada keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana/pembangunan keluarga.

Tabel 8. Proporsi Penduduk Kota Parepare berdasarkan status perkawinan.

NO.	STATUS KAWIN	LK	%	PR	%	JUM	%
1	BELUM KAWIN	39321	27.8	34271	24.3	73592	52.08
2	KAWIN	29138	20.6	30952	21.9	60090	42.52
3	CERAI HIDUP	677	0.48	1671	1.18	2348	1.66
4	CERAI MATI	729	0.52	4550	3.22	5279	3.74
.	JUMLAH	69865	49.4	71444	50.6	141309	100

a). Angka perkawinan menurut kelompok umur

Tabel 9 Proporsi Penduduk Kota Parepare Berdasrkan Status Perkawinan dan Kelompok Umur

NO	UMUR	BELUM KAWIN	%	KAWIN	%	CERAI HIDUP	%	CERAI MATI	%	JUMLAH	%
1	00-04	12070	8.54							12070	8.54
2	08-09	14282	10.1							14282	10.1
3	10-14	14341	10.2	1	0					14342	10.2
4	15-19	14079	9.96	365	0.26	3	0	1	0	14448	10.2
5	20-24	8795	6.22	2702	1.91	55	0	4	0	11556	8.18
6	25-29	4529	3.21	6375	4.51	197	0.1	19	0	11120	7.87
7	30-34	1985	1.4	8463	5.99	266	0.2	60	0	10774	7.62
8	35-39	1091	0.77	9239	6.54	345	0.2	121	0.1	10796	7.64
9	40-44	736	0.52	8283	5.86	316	0.2	184	0.1	9519	6.74
10	45-49	621	0.44	7536	5.33	343	0.2	363	0.3	8863	6.27
11	50-54	393	0.28	6003	4.25	274	0.2	526	0.4	7196	5.09
12	55-59	290	0.21	4531	3.21	219	0.2	713	0.5	5753	4.07
13	60-64	173	0.12	2763	1.96	141	0.1	765	0.5	3842	2.72
14	65-69	103	0.07	1744	1.23	83	0.1	718	0.5	2648	1.87
15	70-74	53	0.04	1114	0.79	57	0	740	0.5	1964	1.39
16	>= 75	51	0.04	971	0.69	49	0	1065	0.8	2136	1.51
17	JUMLAH	73592	52.1	60090	42.5	2348	1.7	5279	3.7	141309	100

d). Rata-rata umur kawin pertama

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternative kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Untuk mendapatkan rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat para demographer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur.

Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM). Definisi *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang masih lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indicator rata- rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan pada perencanaan pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan.

Data yang diperlukan :

- Data penduduk kelompok umur 15 – 54 tahun menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin
- Data penduduk yang belum kawin pada kelompok umur 15 –54 tahun menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis Kelamin.

Langkah-langkah menghitung SMAM sebagai berikut :

1) Menghitung jumlah kelangsungan hidup melajang penduduk sebelum tepat usia 15 tahun. Jika sudah diasumsikan terdapat 100 orang dengan usia di bawah 15 tahun dengan status belum kawin (lajang), maka jumlah tahun yang dijalaninya dengan melajang adalah : 100 X 15 = 1.500 tahun

2) Menghitung jumlah kelangsungan hidup melajang penduduk kelompok umur 15 – 49 tahun.

Pertama menjumlahkan persentase penduduk belum kawin pada kelompok umur 15 – 49 tahun lalu dikalikan dengan 5 (yaitu interval umur 5 tahunan)

3) Pada tabel 8 persentase penduduk dengan status belum kawin (lajang) adalah 257,55 persen (data penduduk Kota Parepare Tahun 2015), maka jumlah tahun kelangsungan hidup melajang penduduk kelompok umur 15 – 49 tahun adalah 257,55 X 5 (interval tahun) = 1.287, 75 tahun.

KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN	PENDUDUK	PRESENTASE
15-19	14079	14448	97.45
20-24	12036	15392	76.11
25-29	7620	15514	40.73
30-34	3995	15270	18.42
35-39	2356	13998	10.11
40-44	1322	12015	7.73
45-49	915	10626	7.01
JUMLAH PRESENTASE			**257.55**
50-54	393	7196	5.46

4) Menjumlahkan kelangsungan hidup melajang penduduk sebelum berumur 50 tahun (0 -= 49 tahun) yaitu dengan menjumlahkan point 1) dengan point 3), maka diperoleh :1500 + 1.287,75 = 2.787,75 tahun.

5) Menghitung persentase penduduk dengan status belum kawin (lajang) tepat pada ulang tahun ke 50. Angka ini diperoleh dari penjumlahan persentase penduduk yang lajang pada kelompok umur 45-49 tahun dengan 50-54 tahun dibagi 2, yaitu (7.01 + 5.46) : 2 = 6,235 persen

6) Menghitung tahun kelangsungan hidup melajang penduduk sampai tepat berumur 50 tahun,yaitu dengan mengalikan point 5) dengan 50 (umur tepat 50 tahun), yaitu (6,235 X 50) = 311,75 tahun

7) Menghitung jumlah kelangsungan hidup penduduk kawin sampai tepat umur 50 tahun, yaitu dengan mengurangi point (4) dengan point 6) maka diperoleh ; 2.787.75 – 311.75 = 2.476 tahun kelangsungan hidup melajang dari kelompok penduduk yang menikah sebelum tepat berumur 50 tahun.

8) Menghitung jumlah penduduk sintetis *(hipotesa)* yang menikah sampai tepat umur 50 tahun, yaitu dengan mengurangi dari 100 penduduk yang diasumsikan pada point (1) dengan point 5), maka hasilnya 100 -6,235 = 93,765 persen.

9) Dari point 7) dan 8) dapat disimpulkan bahwa dari 93,765 penduduk sintetis yang menikah sampai tepat umur 50 tahun mempunyai 2.476 tahun kelangsungan hidup melajang.

10) Menghitung rata usia kawin pertama penduduk *(singulate mean age at marriage*) SMAM) yaitu dengan membagi point 7) dengan pont 8) maka hasilnya 2.476 : 93,765 = **26,41** tahun.

Interpretasi :

Angka 26,41 dapat di interpretasikan sebagai rata-rata umur pertama kali kawin penduduk perempuan Kota Parepare pada tahun 2017. Artinya bahwa rata-rata kawin pertama penduduk Kota Parepare pada tahun 2017 adalah umur 26 tahun.

3. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluaga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual.oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting,tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

a) Jumlah keluarga dan rata-rata anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dalam kelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan

karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Kieluarga menjadi dua yaitu *inti/batin (nuclear family)* dan keluarga luas *(extended family)*. Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau biasa disebut dengan *sandwiches family,* dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam kehidupan semacam ini.

Tabel 12.

KODE WILAYAH	KELURAHAN	PENDUDUK	KK	RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA
7372011010	GALUNG MALOANG	4750	1292	4
7372011009	LEMOE	2738	804	3
7372011004	LOMPOE	9639	2625	4
7372011005	WT. BACUKIKI	2092	634	3
7372021003	UJUNG BULU	6009	1768	3
7372021005	MALLUSETASI	1881	576	3
7372021002	UJUNG SABBANG	3455	1010	3
7372021004	LAPADDE	14272	3942	4
7372021001	LABUKKANG	7065	2031	3
7372031004	KAMPUNG PISANG	3417	991	3
7372031003	WATANG SOREANG	6970	1940	4

7372031002	UJUNG BARU	5324	1543	3
7372031001	LAKESSI	3167	940	3
7372031007	BUKIT HARAPAN	10959	3027	4
7372031006	BUKIT INDAH	11909	3258	4
7372031005	UJUNG LARE	4248	1227	3
7372041005	SUMPANG MINANGAE	5444	1673	3
7372041001	KAMPUNG BARU	5241	1504	3
7372041006	BUMI HARAPAN	9553	2581	4
7372041002	CAPPAGALUNG	7091	2111	3
7372041003	LUMPUE	9065	2671	3
7372041004	TIRO SOMPE	7020	1995	4
7372	KOTA PAREPARE	141309	40143	4

dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Parepare sekitar 4 orang dalam satu keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluaga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana diwilayah kota Pare-pare dan dapat digunakan Pemerintah Kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

b) Hubungan dengan Kepala keluarga.

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala

keluarga seperti, suami, istri,anak,menantu, cucu, keponakan, orangtua dan mertua, termasuk adanya oranglain yang tinggal bersama seperti pembantu rumahtangga.

Tabel 13 ini menunjukkan status hubungan antara anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu.rumah tangga.

Tabel 13.

NO.	STATUS HUBUNGAN KELUARGA	LK	PR	JUM
1	KEPALA KELUARGA	30610	9533	40143
2	SUAMI	1		1
3	ISTRI		25962	25962
4	ANAK	35081	30877	65958
5	MENANTU	95	70	165
6	CUCU	1526	1401	2927
7	ORANG TUA	77	421	498
8	MERTUA	84	482	566
9	FAMILI LAIN	2343	2648	4991
10	PEMBANTU		3	3
11	LAINNYA	46	46	92
.	JUMLAH	69863	71443	141306

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur.

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting untuk diketahui, terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain.

Tabel. 14. Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

NO	UMUR	LK	%	PR	%	JUMLAH
1	15-19	87	0.22	68	0.17	155
2	20-24	858	2.14	377	0.94	1235
3	25-29	2598	6.47	614	1.53	3212
4	30-34	3924	9.78	701	1.75	4625
5	35-39	4573	11.39	821	2.05	5394
6	40-44	4225	10.52	819	2.04	5044
7	45-49	4066	10.13	1015	2.53	5081
8	50-54	3224	8.03	1073	2.67	4297
9	55-59	2615	6.51	1061	2.64	3676
10	60-64	1748	4.35	885	2.20	2633
11	65-69	1136	2.83	722	1.80	1858
12	70-74	762	1.90	641	1.60	1403
13	>= 75	794	1.98	736	1.83	1530
14	JUMLAH	30610	76.25	9533	23.75	40143

Tabel 14 menunjukkan bahwa di Kota Parepare proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 35 – 39 tahun yakni sebesar 13,44 % sedangkan proporsi terendah berada pada kelompok umur 15- 19 tahun yakni 0,39 %. Dalam kelompok Kepala Keluarga laki-laki proporsi tertinggi juga di kelompok umur 35-39 yakni 11,39%, sedangkan proporsi terendahnya terletak di kelompok umur 15-19 tahun juga. Dalam kelompok Kepala Keluarga Perempuan proporsi tertinggi terletak di kelompok umur 50-54 Tahun yakni 2,67 %, sedangkan proporsi terendahnya terletak di kelompok umur 15 – 19 tahun yakni 0,17%.

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan jenis Kelamin.

Karakteristik Kepala Keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi Kepala Keluarga, bagaimana kecenderungan di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang di kepalai oleh seorang perempuan.

Pada tabel 14 dapat kita lihat bahwa di Kota Parepare laki-laki yang menjadi Kepala Keluarga sebesar 76,25 % sedangkan Kepala Keluarga perempuan 23,75 %. Ini menunjukkan bahwa anggapan umum masyarakat Indonesia bahwa laki-laki sebagai penanggungjawab keluarga dan tulang punggung ekonomi keluarga masih melekat, adapun adanya kepala keluarga perempuan pasti karena suami sudah meninggal, atau sudah bercerai sedangkan belum ada anak laki-laki yang dewasa, bukan karena kehidupan modern bahwa perempuanpun bisa mandiri dan mampu memimpin keluarga.

f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapaioleh kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkatkesejahteraan keluarga.

Tabel. 16. Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Akhir

NO.	PENDIDIKAN	LK	PLK	PR	PPR	JDUK	PDUK (%)
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	375	0.93	328	0.82	703	1.75
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	488	1.22	359	0.89	847	2.11
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	6277	15.64	3111	7.75	9388	23.39
4	SLTP/SEDERAJAT	5305	13.22	1799	4.48	7104	17.7
5	SLTA/SEDERAJAT	13064	32.54	2871	7.15	15935	39.7
6	DIPLOMA I/II	154	0.38	91	0.23	245	0.61

7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	571	1.42	207	0.52	778	1.94
8	DIPLOMA IV/STRATA I	3911	9.74	717	1.79	4628	11.53
9	STRATA-II	444	1.11	50	0.12	494	1.23
10	STRATA-III	21	0.05			21	0.05
.	JUMLAH	30610	76.25	9533	23.75	40143	100

Interpretasi :

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Keluarga berpendidikan SLTA/Sederajat yakni 39,7 % disusul dengan Tamat SD/Sederajat yakni 23,39 %, kemudian Tamat SLTP/Sederajat sebesar 17,7 %. Yang Tamat Diploma IV / Strata 1 sederajat 11,53 %.

g) Karakteristik Kepala Keluarga BerdasarkanStatus Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pos ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk

perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel. 17. Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

NO.	JENIS PEKERJAAN	LK	%	PR	%	JDUK	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	698	1.74	485	1.21	1183	2.95
2	MENGURUS RUMAH TANGGA			6626	16.5	6626	16.51
3	PELAJAR/MAHASISWA	293	0.73	227	0.57	520	1.3
4	PENSIUNAN	1063	2.65	221	0.55	1284	3.2
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2166	5.4	420	1.05	2586	6.44
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	480	1.2	1	0	481	1.2
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	805	2.01	3	0.01	808	2.01

8	PERDAGANGAN	110	0.27	23	0.06	133	0.33
9	PETANI/PEKEBUN	1097	2.73	34	0.08	1131	2.82
10	PETERNAK	13	0.03			13	0.03
11	NELAYAN/PERIKANAN	633	1.58	2	0	635	1.58
12	INDUSTRI	6	0.01	1	0	7	0.02
13	KONSTRUKSI	27	0.07	1	0	28	0.07
14	TRANSPORTASI	359	0.89	1	0	360	0.9
15	KARYAWAN SWASTA	1811	4.51	157	0.39	1968	4.9
16	KARYAWAN BUMN	430	1.07	23	0.06	453	1.13
17	KARYAWAN BUMD	68	0.17	1	0	69	0.17
18	KARYAWAN HONORER	275	0.69	49	0.12	324	0.81
19	BURUH HARIAN LEPAS	1833	4.57	21	0.05	1854	4.62
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	33	0.08	2	0	35	0.09
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	37	0.09			37	0.09
22	BURUH PETERNAKAN	5	0.01			5	0.01
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA			7	0.02	7	0.02
24	TUKANG CUKUR	4	0.01			4	0.01
25	TUKANG BATU	166	0.41	1	0	167	0.42
26	TUKANG KAYU	119	0.3			119	0.3
27	TUKANG SOL SEPATU	1	0			1	0
28	TUKANG LAS/PANDAI BESI	2	0			2	0
29	TUKANG JAHIT	20	0.05	18	0.04	38	0.09
30	TUKANG GIGI	1	0			1	0
31	PENATA RIAS	3	0.01	2	0	5	0.01
32	PENATA BUSANA			1	0	1	0
33	PENATA RAMBUT	1	0	1	0	2	0
34	MEKANIK	18	0.04			18	0.04

35	SENIMAN	7	0.02	1	0	8	0.02
36	PARAJI	1	0			1	0
37	PERANCANG BUSANA	1	0	1	0	2	0
38	PENTERJEMAH	1	0			1	0
39	IMAM MASJID	5	0.01			5	0.01
40	PENDETA	15	0.04	1	0	16	0.04
41	PASTOR	3	0.01			3	0.01
42	WARTAWAN	35	0.09	2	0	37	0.09
43	USTADZ/MUBALIGH	5	0.01	1	0	6	0.01
44	JURU MASAK	1	0			1	0
45	WALIKOTA	1	0			1	0
46	WAKIL WALIKOTA	1	0			1	0
47	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	19	0.05	2	0	21	0.05
48	DOSEN	126	0.31	10	0.02	136	0.34
49	GURU	425	1.06	210	0.52	635	1.58
50	PENGACARA	11	0.03			11	0.03
51	NOTARIS			3	0.01	3	0.01
52	ARSITEK	2	0			2	0
53	KONSULTAN	10	0.02	1	0	11	0.03
54	DOKTER	15	0.04	11	0.03	26	0.06
55	BIDAN			13	0.03	13	0.03
56	PERAWAT	15	0.04	12	0.03	27	0.07
57	APOTEKER			2	0	2	0
58	PELAUT	170	0.42			170	0.42
59	SOPIR	537	1.34	1	0	538	1.34
60	PIALANG	1	0			1	0
61	PEDAGANG	172	0.43	62	0.15	234	0.58

62	PERANGKAT DESA	1	0			1	0
63	BIARAWAN/BIARAWATI			1	0	1	0
64	WIRASWASTA	16440	41	869	2.16	17309	43.12
65	PEKERJAAN LAINNYA	10	0.02	1	0	11	0.03
66	SECURITY	3	0.01			3	0.01
67	PEG. RUMAH SAKIT			1	0	1	0
.	JUMLAH	30610	76.3	9533	23.8	40143	100

4. Penduduk menurut karakter sosial

a) Jumlah penduduk menurut pendidikan.

Tabel. 18. Proporsi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

NO.	PENDIDIKAN	LK	LK(%)	PR	PR(%)	JDUK	PDUK(%)
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	375	0.93	328	0.82	703	1.75
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	488	1.22	359	0.89	847	2.11
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	6277	15.64	3111	7.75	9388	23.39
4	SLTP/SEDERAJAT	5305	13.22	1799	4.48	7104	17.7
5	SLTA/SEDERAJAT	13064	32.54	2871	7.15	15935	39.7
6	DIPLOMA I/II	154	0.38	91	0.23	245	0.61
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	571	1.42	207	0.52	778	1.94
8	DIPLOMA IV/STRATA I	3911	9.74	717	1.79	4628	11.53
9	STRATA-II	444	1.11	50	0.12	494	1.23
10	STRATA-III	21	0.05			21	0.05
.	JUMLAH	30610	76.25	9533	23.75	40143	100

c) Jumlah penduduk menurut agama.

Tabel. 19. Proporsi Penduduk Berdasarkan Agama

NO.	NMAG	LK	PLK	PR	PPR	JDUK	PDUK
1	ISLAM	65587	46.4	67066	47.5	132653	93.87
2	KRISTEN	2611	1.85	2607	1.84	5218	3.69
3	KATHOLIK	939	0.66	1036	0.73	1975	1.4
4	HINDU	344	0.24	351	0.25	695	0.49
5	BUDHA	377	0.27	378	0.27	755	0.53
6	KHONGHUCU	2	0	2	0	4	0
7	KEPERCAYAAN	5	0	4	0	9	0.01
.	JUMLAH	69865	49.4	71444	50.6	141309	100

d) Jumlah penduduk menurut kecatatan.

Tabel. 20 Proporsi Penduduk Berdasarkan Kecacatan

NO.	JENIS CACAT	LK	PR	JUMLAH
1	CACAT FISIK	25	30	55
2	CACAT NETRA/BUTA	10	16	26
3	CACAT RUNGU/WICARA	9	12	21
4	CACAT MENTAL/JIWA	11	10	21
5	CACAT FISIK DAN MENTAL	6	3	9
6	CACAT LAINNYA	11	6	17
.	JUMLAH	72	77	149

Jumlah dan Proporsi Penduduk yang bekerja menurut Jenis Pekerjaan.

Tabel 24 Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan.

NO.	JENIS PEKERJAAN	LK	%	PR	%	JDUK	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	18992	13.4	17608	12.5	36600	25.9
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	0	28855	20.4	28856	20.4
3	PELAJAR/MAHASISWA	17545	12.4	16181	11.5	33726	23.9
4	PENSIUNAN	1091	0.77	408	0.29	1499	1.06
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2251	1.59	2249	1.59	4500	3.18
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	488	0.35	5	0	493	0.35
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	845	0.6	17	0.01	862	0.61
8	PERDAGANGAN	119	0.08	55	0.04	174	0.12
9	PETANI/PEKEBUN	1165	0.82	52	0.04	1217	0.86
10	PETERNAK	13	0.01	1	0	14	0.01
11	NELAYAN/PERIKANAN	696	0.49	2	0	698	0.49
12	INDUSTRI	7	0	2	0	9	0.01
13	KONSTRUKSI	33	0.02	1	0	34	0.02
14	TRANSPORTASI	386	0.27	2	0	388	0.27
15	KARYAWAN SWASTA	2205	1.56	1055	0.75	3260	2.31
16	KARYAWAN BUMN	486	0.34	149	0.11	635	0.45
17	KARYAWAN BUMD	72	0.05	17	0.01	89	0.06
18	KARYAWAN HONORER	362	0.26	415	0.29	777	0.55
19	BURUH HARIAN LEPAS	2090	1.48	38	0.03	2128	1.51
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	37	0.03	4	0	41	0.03
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	41	0.03			41	0.03
22	BURUH PETERNAKAN	5	0			5	0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA			21	0.01	21	0.01

24	TUKANG CUKUR	4	0			4	0
25	TUKANG LISTRIK	1	0			1	0
26	TUKANG BATU	198	0.14	1	0	199	0.14
27	TUKANG KAYU	128	0.09			128	0.09
28	TUKANG SOL SEPATU	1	0	1	0	2	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	2	0			2	0
30	TUKANG JAHIT	21	0.01	41	0.03	62	0.04
31	TUKANG GIGI	1	0			1	0
32	PENATA RIAS	6	0	4	0	10	0.01
33	PENATA BUSANA			1	0	1	0
34	PENATA RAMBUT	1	0	1	0	2	0
35	MEKANIK	21	0.01			21	0.01
36	SENIMAN	8	0.01	4	0	12	0.01
38	PARAJI	1	0	1	0	2	0
39	PERANCANG BUSANA	1	0	1	0	2	0
40	PENTERJEMAH	1	0			1	0
41	IMAM MASJID	5	0			5	0
42	PENDETA	16	0.01	1	0	17	0.01
43	PASTOR	3	0			3	0
44	WARTAWAN	35	0.02	5	0	40	0.03
45	USTADZ/MUBALIGH	5	0	1	0	6	0
46	JURU MASAK	1	0	1	0	2	0
60	WALIKOTA	1	0			1	0
61	WAKIL WALIKOTA	1	0			1	0
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20	0.01	3	0	23	0.02
64	DOSEN	132	0.09	77	0.05	209	0.15
65	GURU	449	0.32	1052	0.74	1501	1.06

66	PILOT	1	0	1	0	2	0
67	PENGACARA	12	0.01	1	0	13	0.01
68	NOTARIS	1	0	8	0.01	9	0.01
69	ARSITEK	2	0	1	0	3	0
71	KONSULTAN	10	0.01	3	0	13	0.01
72	DOKTER	20	0.01	40	0.03	60	0.04
73	BIDAN			58	0.04	58	0.04
74	PERAWAT	17	0.01	157	0.11	174	0.12
75	APOTEKER	1	0	8	0.01	9	0.01
78	PENYIAR RADIO			1	0	1	0
79	PELAUT	209	0.15			209	0.15
80	PENELITI	1	0			1	0
81	SOPIR	569	0.4	1	0	570	0.4
82	PIALANG	1	0			1	0
84	PEDAGANG	184	0.13	148	0.1	332	0.23
85	PERANGKAT DESA	1	0	1	0	2	0
87	BIARAWAN/BIARAWATI			2	0	2	0
88	WIRASWASTA	18828	13.3	2678	1.9	21506	15.2
89	PEKERJAAN LAINNYA	12	0.01	2	0	14	0.01
90	SECURITY	3	0			3	0
91	PEG. RUMAH SAKIT			2	0	2	0
.	JUMLAH	69865	49.4	71444	50.6	141309	100

Interpretasi :

Persentasi tertinggi dari jenis pekerjaan penduduk Kota Parepare terletak pada jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa sebesar 23,9 %, disusul oleh jenis pekerjaan sebagai Pengurus Rumah Tangga 20,4 %, urutan ketiga pada jenis pekerjaan sebagai Karyawan swasta sebesar 15,2%.

d.Sosial

1.Jumlah penyandang masalah kesejahtraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. baik jasmani rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. hamabatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecatatan ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubvahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.

para penyandang masalah kesejahtraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang kesejahtraan sosial

slah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilityas (penyandang cacat). data dan informasi tentang penyandang cacat dan jenis kecatatannya sangat diperlukan dalam rangka memeberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang cacat. pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity (*belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik.

2. Proporsi penduduk penyandang cacat

C. MOBILITAS PENDUDUK

a.Mobilitas Permanen

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara suatu daerah dengan daerah lain. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun nonpermanent akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari propinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota, Kecamatan maupun desa/kelurahan. Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

1. Migrasi Masuk (Mi)
2. Migrasi Keluar (Mo)
3. Migrasi Neto (Mn)
4. Migrasi Bruto (Mb)
5. Presentase Migrasi dari pedesaan ke perkotaan.

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (Kabupaten/Kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau

alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

1.Migrasi masuk.(in migration /Mi).

Angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Migrasi masuk (MI) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Mi= mig masuk/P X K

Mi = Angka migrasi risen masuk penduduk yang pernah tinggal di daerah lain

Mig masuk = Jumlah Penduduk yang masuk kedaerah tujuan

P = Jumlah Penduduk daerah tujuan

K = Konstanta.

2.Migrasi Keluar (out migration/Mo)

Angka yang menunjukkan banyaknya migrant keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.

Rumus :

Mo = mig out/P X K

Mo = Angka migrasi risen keluar Penduduk

Mig out= jumlah penduduk yang pindah keluar selama 1 tahun

P = Jumlah Penduduk

K = Konstanta.

3.Migrasi neto.(Nett Migration/ Mn)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, dalam kondisi terbalik disebut migrasi neto negatif.

Rumus : Mn = Mig Masuk-Mig Out/P X K

Mn = Migrasi Neto

Mig Masuk = jumlah Penduduk yang pindah datang dalam kurun waktu 1 tahun

Mig out = jumlah penduduk yang pindah keluar dalam kurun waktu 1 tahun

P = Penduduk

K = Konstanta

1. Migrasi Bruto (Bruto Migration)

Angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.

$$\text{Mbruto} = \frac{\Sigma \text{ Mig Masuk} + \Sigma \text{ Mig Out}}{\Sigma \text{ Penduduk.2}} \text{ X K}$$

b. Mobilitas Non Permanen

c.Urbanisasi

1. presentase penduduk Kota

2. Rasio Kota dan desa

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan seperti KTP, kartu Keluarga, Akta Kelahiran Akta Kematian dan Akta perkawinan / Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain, kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena berstatus janda dan Untuk menghindari kepala keluarga ganda perempuan juga menjadi kepala keluarga apabila menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki. Begitupun dengan istri pertama, sesuai kesepakatan dalam keluarga tersebut.

KEL_KEC	CETAK	%	BELUM CETAK	%	KARTU KELUARGA
LOMPOE	1999	77.18	591	22.82	2590
WT. BACUKIKI	488	78.58	133	21.42	621
LEMOE	620	78.38	171	21.62	791
GALUNG MALOANG	986	75.38	322	24.62	1308
KEC. BACUKIKI	**4093**	**77.08**	**1217**	**22.92**	**5310**
LABUKKANG	1437	72.5	545	27.5	1982
UJUNG SABBANG	720	72.65	271	27.35	991
UJUNG BULU	1351	78.73	365	21.27	1716
LAPADDE	2974	76.79	899	23.21	3873
MALLUSETASI	436	76.49	134	23.51	570
KEC. UJUNG	**6918**	**75.76**	**2214**	**24.24**	**9132**
LAKESSI	693	77.34	203	22.66	896
UJUNG BARU	1183	78.4	326	21.6	1509
WATANG SOREANG	1462	77.6	422	22.4	1884
KAMPUNG PISANG	699	73.27	255	26.73	954
UJUNG LARE	918	76.63	280	23.37	1198
BUKIT INDAH	2407	74.89	807	25.11	3214
BUKIT HARAPAN	2254	75.89	716	24.11	2970
KEC. SOREANG	9616	76.17	3009	23.83	12625
KAMPUNG BARU	1084	74.5	371	25.5	1455
CAPPAGALUNG	1586	76.73	481	23.27	2067
LUMPUE	2070	78.98	551	21.02	2621
TIRO SOMPE	1468	75.32	481	24.68	1949
SUMPANG MINANGAE	1236	75.27	406	24.73	1642
BUMI HARAPAN	1845	72.92	685	27.08	2530
KEC. BACUKIKI BARAT	9289	75.74	2975	24.26	12264
KOTA PAREPARE	**29916**	**76.06**	**9415**	**23.94**	**39331**

B. KEPEMILIKAN E-KTP

KELURAHAN	PENDUDUK BER KTP EL				PENDUDUK BELUM BER KTP EL				WAJIB KTP		
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUM
LOMPOE	2988	3103	6091	96	135	119	254	4	3123	3222	6345
WT. BACUKIKI	647	717	1364	96.2	38	16	54	3.8	685	733	1418
LEMOE	879	935	1814	96.4	36	32	68	3.6	915	967	1882
GALUNG MALOANG	1414	1541	2955	96	70	54	124	4	1484	1595	3079
KEC. BACUKIKI	**5928**	**6296**	**12224**	**96.1**	**279**	**221**	**500**	**3.9**	**6207**	**6517**	**12724**
LABUKKANG	2275	2380	4655	96.8	77	77	154	3.2	2352	2457	4809
UJUNG SABBANG	1086	1211	2297	96	48	48	96	4	1134	1259	2393
UJUNG BULU	1871	2040	3911	95.8	95	77	172	4.2	1966	2117	4083
LAPADDE	4473	4876	9349	96	204	185	389	4	4677	5061	9738

MALLUSETASI	604	689	1293	96.9	25	16	41	3.1	629	705	1334
KEC. UJUNG	**10309**	**11196**	**21505**	**96.2**	**449**	**403**	**852**	**3.8**	**10758**	**11599**	**22357**
LAKESSI	951	1146	2097	96.5	44	33	77	3.5	995	1179	2174
UJUNG BARU	1672	1844	3516	96.6	64	61	125	3.4	1736	1905	3641
WATANG SOREANG	2132	2264	4396	96	100	82	182	4	2232	2346	4578
KAMPUNG PISANG	1056	1164	2220	95.9	54	42	96	4.2	1110	1206	2316
UJUNG LARE	1343	1463	2806	96.6	52	47	99	3.4	1395	1510	2905
BUKIT INDAH	3719	3922	7641	95.9	185	146	331	4.2	3904	4068	7972
BUKIT HARAPAN	3406	3501	6907	95.9	161	135	296	4.1	3567	3636	7203
KEC. SOREANG	**14279**	**15304**	**29583**	**96.1**	**660**	**546**	**1206**	**3.9**	**14939**	**15850**	**30789**
KAMPUNG BARU	1617	1767	3384	96	82	59	141	4	1699	1826	3525
CAPPAGALUNG	2137	2384	4521	96	107	82	189	4	2244	2466	4710
LUMPUE	2911	3103	6014	96.7	109	99	208	3.3	3020	3202	6222
TIRO SOMPE	2049	2249	4298	95	129	99	228	5	2178	2348	4526
SUMPANG MINANGAE	1736	1839	3575	96.2	77	63	140	3.8	1813	1902	3715
BUMI HARAPAN	2904	3074	5978	95.8	132	128	260	4.2	3036	3202	6238
KEC. BACUKIKI BARAT	**13354**	**14416**	**27770**	**96**	**636**	**530**	**1166**	**4**	**13990**	**14946**	**28936**
KOTA PAREPARE	**43870**	**47212**	**91082**	**96.1**	**2024**	**1700**	**3724**	**3.9**	**45894**	**48912**	**94806**

C. KEPEMILIKAN AKTA

1. AKTA KELAHIRAN

KELURAHAN	MEMILIKI AKTA LAHIR				BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR				JUMLAH
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
LOMPOE	3680	3575	7255	75.27	1153	1231	2384	24.73	9639
WT. BACUKIKI	836	879	1715	81.98	185	192	377	18.02	2092
LEMOE	1064	1100	2164	79.04	280	294	574	20.96	2738
GALUNG MALOANG	1816	1819	3635	76.53	537	578	1115	23.47	4750
KEC. BACUKIKI	7396	7373	14769	76.85	2155	2295	4450	23.15	19219
LABUKKANG	2377	2383	4760	67.37	1132	1173	2305	32.63	7065
UJUNG SABBANG	1199	1218	2417	69.96	491	546	1037	30.01	3455
UJUNG BULU	2185	2182	4367	72.67	764	878	1642	27.33	6009
LAPADDE	5187	5196	10383	72.75	1841	2047	3888	27.24	14272

MALLUSETASI	695	633	1328	70.6	249	304	553	29.4	1881
KEC. UJUNG	11643	11612	23255	71.16	4477	4948	9425	28.84	32682
LAKESSI	1051	1120	2171	68.55	460	536	996	31.45	3167
UJUNG BARU	1819	1899	3718	69.83	757	849	1606	30.17	5324
WATANG SOREANG	2669	2591	5260	75.47	851	859	1710	24.53	6970
KAMPUNG PISANG	1150	1219	2369	69.33	500	548	1048	30.67	3417
UJUNG LARE	1490	1428	2918	68.69	626	704	1330	31.31	4248
BUKIT INDAH	4295	4259	8554	71.83	1614	1741	3355	28.17	11909
BUKIT HARAPAN	4184	4091	8275	75.51	1342	1342	2684	24.49	10959
KEC. SOREANG	16658	16607	33265	72.32	6150	6579	12729	27.68	45994
KAMPUNG BARU	1741	1804	3545	67.64	814	882	1696	32.36	5241
CAPPAGALUNG	2467	2566	5033	70.98	988	1070	2058	29.02	7091
LUMPUE	3298	3419	6717	74.1	1158	1190	2348	25.9	9065
TIRO SOMPE	2526	2532	5058	72.05	936	1026	1962	27.95	7020
SUMPANG MINANGAE	1757	1760	3517	64.6	936	991	1927	35.4	5444
BUMI HARAPAN	3491	3434	6925	72.49	1274	1354	2628	27.51	9553
KEC. BACUKIKI BARAT	15280	15515	30795	70.93	6106	6513	12619	29.07	43414
KOTA PAREPARE	50977	51107	102084	72.24	18888	20335	39223	27.76	141309

2. AKTA PERKAWINAN

KELURAHAN	MEMILIKI AKTA KAWIN				BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN				JUMLAH PENDUDK STATUS KAWIN
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
LOMPOE	1338	1376	2714	64.43	693	804	1497	35.54	4212
WT. BACUKIKI	327	323	650	67.01	148	170	318	32.78	970
LEMOE	444	459	903	67.54	200	234	434	32.46	1337
GALUNG MALOANG	743	755	1498	71.81	273	315	588	28.19	2086
KEC. BACUKIKI	2852	2913	5765	67	1314	1523	2837	32.97	8605
LABUKKANG	842	860	1702	56.73	624	674	1298	43.27	3000
UJUNG SABBANG	448	473	921	65.23	243	248	491	34.77	1412
UJUNG BULU	836	868	1704	70.71	319	387	706	29.29	2410

LAPADDE	2016	2107	4123	67.45	927	1063	1990	32.55	6113
MALLUSETASI	244	247	491	65.73	121	135	256	34.27	747
KEC. UJUNG	4386	4555	8941	65.35	2234	2507	4741	34.65	13682
LAKESSI	349	376	725	55.34	271	314	585	44.66	1310
UJUNG BARU	685	692	1377	61.25	414	456	870	38.7	2248
WATANG SOREANG	949	992	1941	65.2	494	541	1035	34.77	2977
KAMPUNG PISANG	390	404	794	57.08	294	303	597	42.92	1391
UJUNG LARE	590	617	1207	67.89	273	298	571	32.11	1778
BUKIT INDAH	1572	1670	3242	65.81	798	884	1682	34.15	4926
BUKIT HARAPAN	1523	1593	3116	66.95	724	814	1538	33.05	4654
KEC. SOREANG	6058	6344	12402	64.31	3268	3610	6878	35.67	19284
KAMPUNG BARU	579	620	1199	56	457	485	942	44	2141
CAPPAGALUNG	880	921	1801	61.05	555	594	1149	38.95	2950
LUMPUE	1306	1351	2657	66.13	680	680	1360	33.85	4018
TIRO SOMPE	849	895	1744	60.92	523	596	1119	39.08	2863
SUMPANG MINANGAE	663	670	1333	55.66	517	545	1062	44.34	2395
BUMI HARAPAN	1280	1330	2610	62.86	735	806	1541	37.11	4152
KEC. BACUKIKI BARAT	5557	5787	11344	61.26	3467	3706	7173	38.73	18519
KOTA PAREPARE	18853	19599	38452	63.99	10283	11346	21629	35.99	60090

3. AKTA PERCERAIAN

KELURAHAN	MEMILIKI AKTA CERAI				BELUM MEMILIKI AKTA CERAI				JUMLAH PENDUDK STATUS CERAI
	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
LOMPOE	21	33	54	42.86	19	53	72	57.14	126
WT. BACUKIKI	4	5	9	22.5	7	24	31	77.5	40

LEMOE	3	5	8	27.59	7	14	21	72.41	29
GALUNG MALOANG	5	19	24	31.17	15	38	53	68.83	77
KEC. BACUKIKI	33	62	95	34.93	48	129	177	65.07	272
LABUKKANG	14	26	40	34.48	19	57	76	65.52	116
UJUNG SABBANG	8	10	18	21.95	13	50	63	76.83	82
UJUNG BULU	15	23	38	32.2	23	57	80	67.8	118
LAPADDE	20	53	73	35.61	32	99	131	63.9	205
MALLUSETASI	2	8	10	20.83	15	23	38	79.17	48
KEC. UJUNG	59	120	179	31.46	102	286	388	68.19	569
LAKESSI	14	23	37	51.39	6	28	34	47.22	72
UJUNG BARU	5	28	33	39.76	13	37	50	60.24	83
WATANG SOREANG	12	45	57	47.11	17	46	63	52.07	121
KAMPUNG PISANG	11	19	30	37.97	14	34	48	60.76	79
UJUNG LARE	5	20	25	30.49	16	41	57	69.51	82
BUKIT INDAH	20	42	62	35.23	38	76	114	64.77	176
BUKIT HARAPAN	13	39	52	32.7	35	72	107	67.3	159
KEC. SOREANG	80	216	296	38.34	139	334	473	61.27	772
KAMPUNG BARU	10	27	37	31.9	26	51	77	66.38	116
CAPPAGALUNG	19	32	51	35.92	18	73	91	64.08	142
LUMPUE	11	32	43	33.86	22	62	84	66.14	127
TIRO SOMPE	13	24	37	26.06	33	72	105	73.94	142
SUMPANG MINANGAE	12	14	26	32.5	16	36	52	65	80
BUMI HARAPAN	17	36	53	41.41	16	59	75	58.59	128
KEC. BACUKIKI BARAT	82	165	247	33.61	131	353	484	65.85	735
KOTA PAREPARE	254	563	817	34.8	420	1102	1522	64.82	2348

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2018 merupakan gambaran perkembangan Kependudukan Kota Parepare Pada Tahun 2017. Data Yang Digunakan dalam penyusunan Profil Kependudukan ini adalah hasil konsolidasi dan pembersihan (DKB) yang dilakukan kemendagri untuk menghindari data ganda dan anomali, selain menggunakan data DKB, Profil Perkembangan Kependudukan ini juga disusun berdasarkan hasil data pelayanan yang dilakukan setiap hari dan jam kerja yang tersimpan dalam database kependudukan SIAK Kota Parepare Tahun 2017.

Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan di Kota Parepare, dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.

Untuk Perbaikan dan Penyusunan serta Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan kota Parepare tahun berikutnya , maka diperlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak khususnya instansi yang berkaitan dengan kependudukan tahun mendatang akan lebih baik, lengkap, akurat dan tepat waktu.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap semoga informasi yang kami sajikan dalam profil ini bermanfaat bagi seluruh aspek dan sendi kehidupan masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Parepare Pada Khususnya

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Pada Pasal 6 Ayat (1) Mengamanatkan Kepada Para Bupati/Walikota Melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Untuk Menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota. Profil Perkembangan Kependudukan Tersebut Berisi Gambaran Tentang Kondisi Dan Perkembangan Kependudukan Disetiap Kabupaten/Kota.

Publikasi Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2018 Ini Sangat Penting, Mengingat Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Mengamanatkan Agar Kiranya Dalam Proses Pelayanan Publik, Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Pengalokasian Anggaran, Pembangunan Demokrasi Dan Penegakan Hukum Serta Pencegahan Kriminal Berpedoman Pada Data Dan Informasi Yang Disampaikan Kementrian Yang Bertanggung Jawab Dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Disamping Itu, Data Dan Informasi Kependudukan Yang Disajikan, Akan Menjadi Bahan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Yang Berskala Regional Dan Nasional Serta Berwawasan Kependudukan.

Berpijak Pada Landasan Tersebut, Maka Data Dan Informasi Yang Disajikan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2019, Disusun Berdasarkan Basis Data Yang Terhubung Secara Nasional Dengan Pusat Data Dan Informasi Kementrian Dalam Negeri Yang Telah Melalui Proses Konsolidasi Dan Pembersihan, Artinya Data Tersebut Sudah Dijamin Dan Dapat Dipastikan Tidak Ada Lagi Di Daerah Lain, Dengan Kata Lain Data Hasil Konsolidasi Sudah Tidak Duplikat Lagi.

Dengan Profil Perkembangan Kependudukan Ini, Menggambarkan Serta Memberi Informasi Tentang Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Baik Dari Segi Kuantitas, Kualitas Serta Tingkat Mobilitas Penduduk Kota Parepare Selama Kurun Waktu Satu Tahun Dan Disusun Berdasarkan Tipologi Penduduk Yang Ada Dengan Status Terupdate per 31 Desember 2017.

Disadari Sepenuhnya Bahwa Profil Perkembangan Kependudukan Ini Masih Jauh Dari Sempurna, Oleh Sebab Itu, Sangat Dibutuhkan Berbagai Saran, Masukan Serta Kritikan Sehingga Kedepan Dapat Disusun Dan Dibuat Jauh Lebih Baik Lagi, Yang Dilengkapi Dengan Berbagai Indicator Dan Variable Tambahan, Agar Informasi Yang Disajikan Dapat Memenuhi Kebutuhan Akan Data Dan Informasi Kependudukan Di Kota Parepare

Parepare, Desember 2018
Kepala Dinas,

Drs. H. Amran, M. Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196307171987031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 2

C. Ruang Lingkup 2

D. Pengertian Umun dan Istilah Yang digunakan 3

BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE 8

A. Letak Geografis Daerah 8

B. Kondisi Demografis Kota Parepare 11

C. Gambaran Ekonomi Kota Parepare 11

BAB III. SUMBER DATA 12

BAB IV. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 13

BAB V. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 43

BAB VI. PENUTUP 49